



RENCANA STRATEGIS

BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019-2023



Jl. M.T. Haryono No. 126
Telp. (0541) 201446 Fax. (0541) 732286
SAMARINDA

<https://litbang.kaltimprov.go.id>
humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga Rencana Strategis (Renstra) OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan.



Renstra ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, dalam koridor tugas dan fungsi Badan Litbang sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri No, 86 Tahun 2017. Selain itu Renstra ini juga memperhatikan Pergub Kaltim Nomor 81 tahun 2016 terkait nomenkatur dan tugas fungsi Balitbangda serta Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019.

Renstra Badan Litbang Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini memuat visi Badan Litbang beserta misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta penjabarannya ke dalam arah kebijakan rencana program, kegiatan, dan indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan dan langkah strategis yang telah disusun dalam Renstra ini diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta difokuskan pada pencapaian target kinerja. Renstra Badan Litbang ini juga telah mengakomodir visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Balitbangda dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran untuk mewujudkan visi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, April 2019
Kepala Balitbangda Provinsi
Kaltim

H. Eddy Kuswadi, SE, MM
NIP. 19591206 198503 1 012





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA PROV. KALTIM	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	37
3.2 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi	49
3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan	56
4.2 Sasaran.....	57
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	65
5.1 Strategi dan Kebijakan	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	69





6.2	Pendanaan Indikatif	69
BAB VII	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	86
BAB VIII	PENUTUP	88





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 tahap keempat.

Penyusunan Renstra Balitbangda Prov. Kaltim 2019-2023 mempertimbangkan rencana strategis penelitian dan pengembangan dari Kementerian terkait terutama Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri selaku pembina Balitbangda di Provinsi sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Kementerian teknis yang ada di pusat yaitu Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.





1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;



13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036;
19. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan;



24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan selama periode tahun 2019-2023 yaitu:

1. Sebagai dokumen Rencana Strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2019-2023.
2. Memberikan arahan bagi seluruh staf/pegawai Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan/melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2019-2023.
3. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja organisasi serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan organisasi yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.





4. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Balitbangda ini terdiri atas tujuh bab. Sistematika penulisannya dapat disajikan seperti berikut ini.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya memuat sumberdaya organisasi, kondisi capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2018 dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Komponen Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan badan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023





BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan serta sebagai alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Balitbangda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat harapan dan komitmen terhadap Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

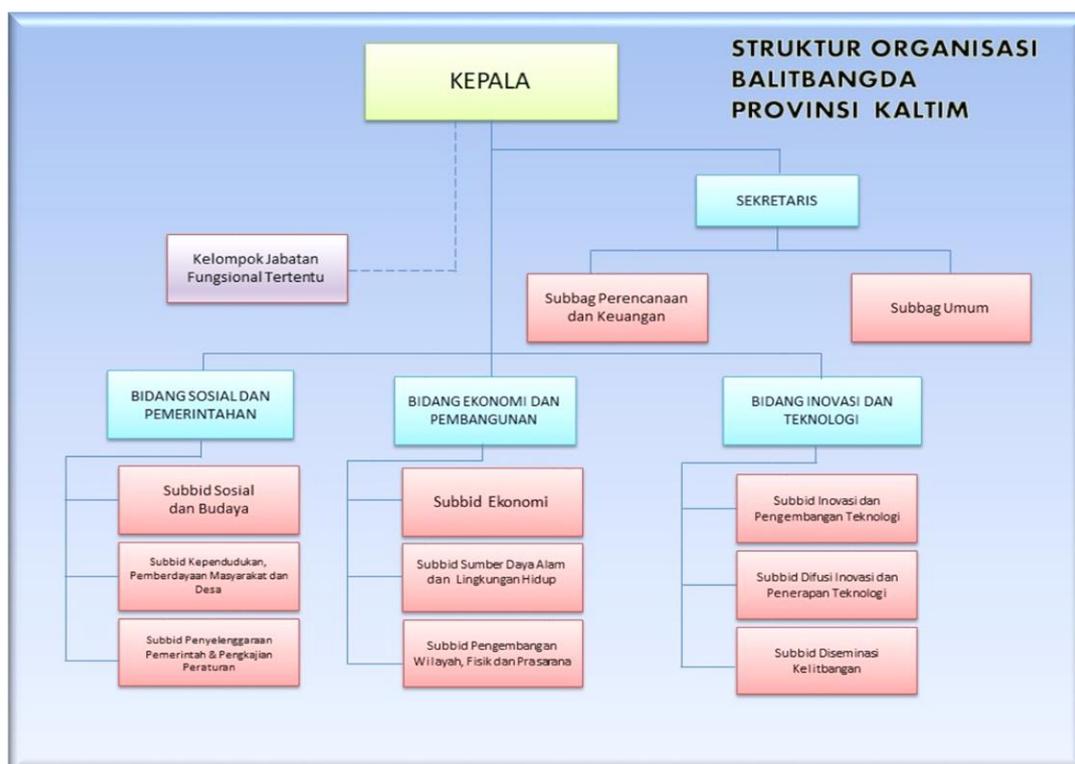


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang serta Rumpun Jabatan Fungsional Peneliti. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Balitbangda Provisi Kalimantan Timur

Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat dikemukakan seperti berikut ini.

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas :





- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat Badan** dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.



Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Sosial dan Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian di bidang sosial dan pemerintahan
- 4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan



- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan
 - 6) Pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - 7) Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - 8) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha
4. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi;
 - 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. **Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Inovasi dan Teknologi membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, program penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis diseminasi kelitbang; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Peneliti (JFP)**

Kelompok jabatan fungsional yang berkedudukan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur





atas usul Kepala Badan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran dan fungsi organisasi penelitian dan pengembangan di daerah semula berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 27. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dimana peraturan bersama ini diterbitkan sebagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing daerah. Disebutkan bahwa pada pasal 33 ayat (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Tingkat Provinsi; ayat (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di Tingkat Kabupaten/Kota, dan ayat (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;
- 2) Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;
- 3) Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
- 4) Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
- 5) Melakukan pengembangan SIDa di daerah;
- 6) Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.

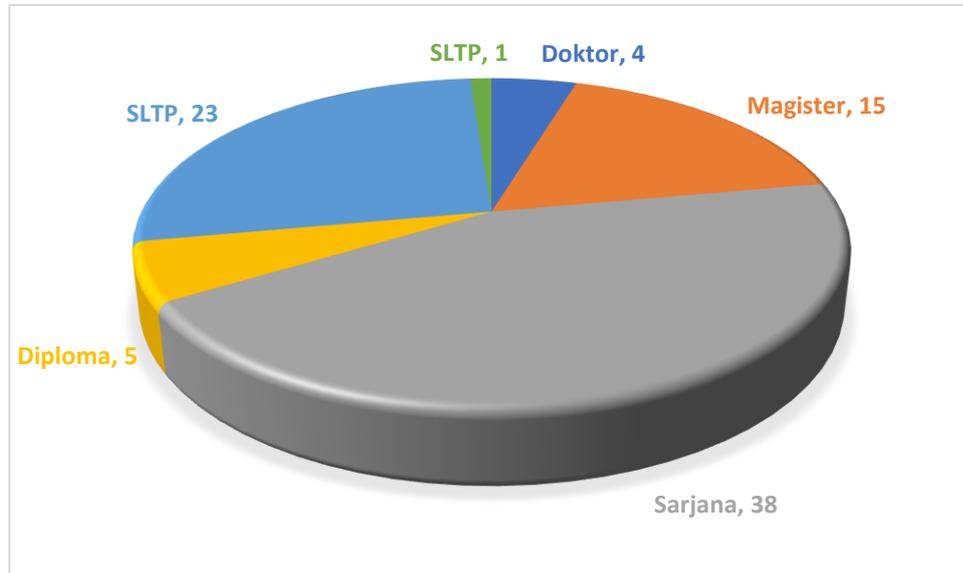
2.2. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan

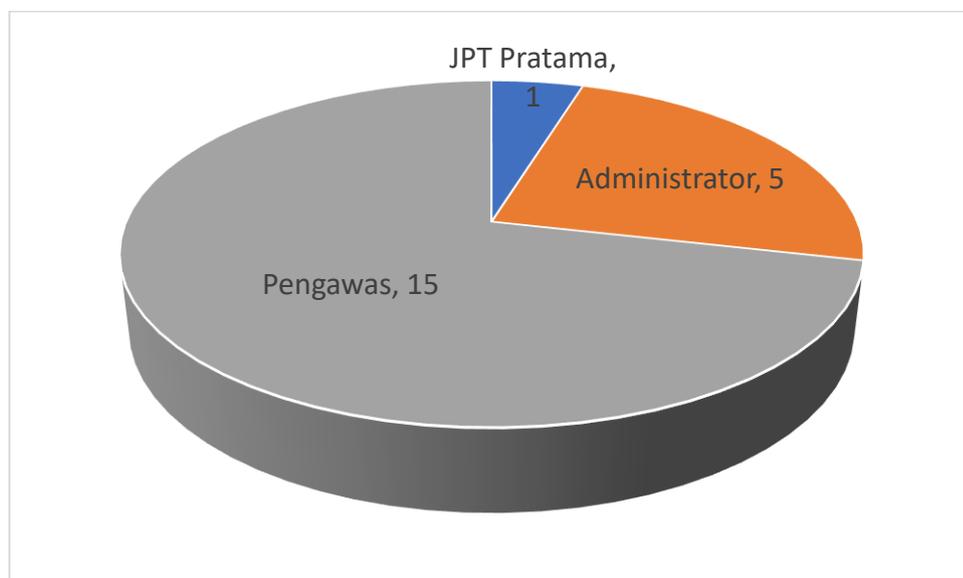


Timur sampai dengan Tahun 2018 berjumlah 86 orang yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar 2.2. sebagai berikut :



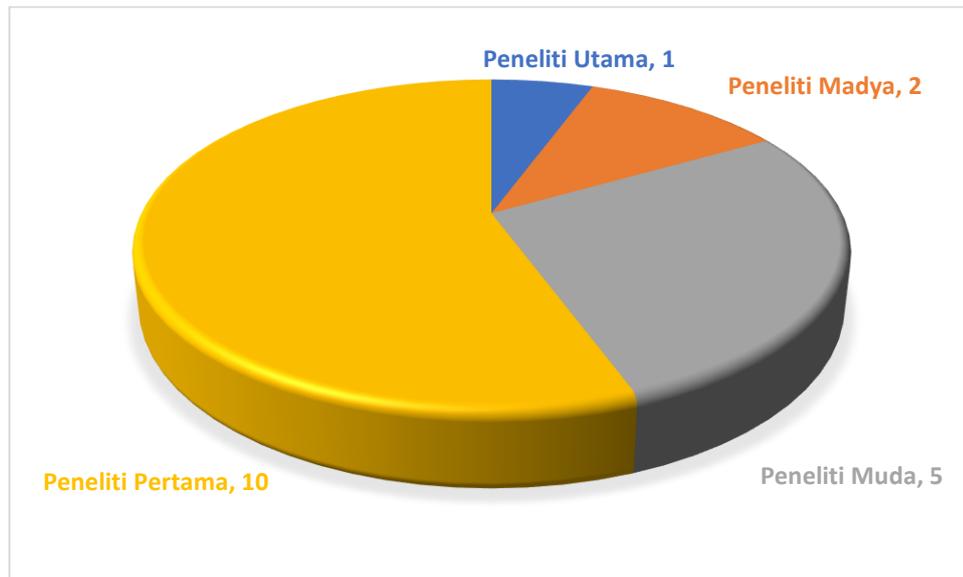
Gambar 2.2. Tingkat Pendidikan ASN Balitbangda Kaltim Tahun 2018

Adapun SDM Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural berjumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 2.3 Jabatan Struktural Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2018

Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 2.4. Jabatan Fungsional Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2018

Keahlian/kepakaran dari pejabat fungsional peneliti tersebut meliputi :

- Peneliti Utama : 1. Kebijakan Publik.
- Peneliti Madya : 1. Manajemen Organisasi
2. Kebijakan Pertanian
- Peneliti Muda : 1. Manajemen Sumber Daya Manusia
2. Teknologi Transportasi Jalan
3. Kebijakan Ekonomi
4. Administrasi Publik
5. Sistem Usaha Pertanian
- Peneliti Pertama : 1. Kebijakan Publik
2. Politik dan Pemerintahan
3. Manajemen Sainifik
4. Teknologi Kimia
5. Hukum Administrasi Negara
6. Keselamatan dan Kualitas
7. Kebijakan Lingkungan
8. Manajemen Industri
9. Kebijakan Publik
10. Perencanaan Wilayah



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 86 orang dengan komposisi pangkat dan golongan/ruang sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pangkat dan Golongan/Ruang PNS dan PTT
Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2018

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina Utama	IV/e	1
2	Pembina Utama Muda	IV/d	1
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	5
5	Pembina	IV/a	5
6	Penata Tingkat I	III/d	13
7	Penata	III/c	10
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	19
9	Penata Muda	III/a	12
10	Pengatur Tingkat I	II/d	2
11	Pengatur	II/c	14
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
13	Pengatur Muda	II/a	1
14	Juru Tingkat I	I/d	1
J u m l a h			86

2. Asset/Modal

Tabel 2.2.
Jumlah Aset/Modal Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2018

ASET MODAL	
Tanah	0.00
Peralatan dan Mesin	0.00
Gedung dan Bangunan	24,900,000.00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
JUMLAH ASET TETAP	24,900,000.00





3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit usaha yang ada untuk menunjang fungsi Badan litbang adalah sebagai berikut :

- 1) Bangunan kantor Balitbangda
- 2) Ruang seminar, diskusi, persentasi dan lain-lain dilengkapi *meubelair* dan *Audio Visual System*
- 3) Ruang rapat staf lengkap dengan *meubelair*
- 4) Ruang Perpustakaan
- 5) Ruang Peneliti
- 6) Ruang Diseminasi Kelitbangan
- 7) Ruang Satpam
- 8) Jaringan Internet
- 9) Gudang
- 10) Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua
- 11) Notebook, PC dan Printer
- 12) Sarana Dokumentasi
- 13) Televisi.
- 14) Layar persentasi/LCD
- 15) Sarana/prasarana lainnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan penelitian



2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim

Setiap tahun Balitbangda melakukan penilaian kinerja pelayanan sesuai perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut penilaian kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sangat baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan bidang penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah mampu mencapai target Indikator. Kinerja Utama yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Badan. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan Renstra periode 2019-2023 sekarang ini.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2017-2018 juga dapat dilihat dari tren peningkatan pembiayaan pembangunan bidang Litbang di Kalimantan Timur yang, pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2017-2018 yang hampir semua 100% serta kondisi umum bidang Litbang di Kalimantan Timur tahun 2018 yang berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 terlihat pada tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/2014	(7)/2015	(8)/2016	(9)/2017	(10)/2018	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	1. Persentase Kelibangan Yang Dilaksanakan dan Dimanfaatkan Dalam Mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah				70%	70%	70%	70%	70%											
	2. Jumlah Rekomendasi Ijin Penelitian/kusisioner Yang Diberikan				2 rekomendasi izin penelitian/kusisioner	2 rekomendasi izin penelitian/kusisioner	2 rekomendasi izin penelitian/kusisioner	2 rekomendasi izin penelitian/kusisioner	2 rekomendasi izin penelitian/kusisioner	1 kusisioner yang diberikan	50%	50%	50%	50%	50%					
	3. Jumlah Fasilitas Kegiatan Kelibangan Pemerintahan dan Pembangunan Serta Inovasi Daerah				150 Fasilitas	150 Fasilitas	150 Fasilitas	150 Fasilitas	150 Fasilitas	138 Fasilitas	142 Fasilitas	150 Fasilitas	118 Fasilitas	83 Fasilitas	92%	95%	100%	79%	56%	
	4. Tersedianya data base kelibangan dan inovasi daerah berbasis web yang berkualitas				1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Jumlah penyelesaian hasil kelibangan (press release, sosialisasi, diseminasi dan penganal/kerja tulis ilmiah)				5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/2014	(7)/2015	(8)/2016	(9)/2017	(10)/2018	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Jumlah jejaring kerja (networking) kabupaten dan inovasi daerah				4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	4 jejaring kerja	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkat				80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	80 (A)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah retribusi daerah				Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 298.320.000	Rp. 300.250.000	Rp. 252.175.200,-	Rp. 180.418.000,-	Rp. 39.300.000,-	104%	120%	101%	120%	28%
9	Sistem manajemen mutu terpelihara				8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	100%	100%	0%
10	Meningkatnya kualitas Hasil Uji Laboratorium				250 Layanan Uji	250 Layanan Uji	250 Layanan Uji	150 Layanan Uji	150 Layanan Uji	250 Layanan Uji	250 Layanan Uji	228 layanan uji	223 layanan uji	27 layanan uji	100%	100%	90%	89%	11%



a. Capaian Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 2.1 tersebut dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kunci, dimana terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya $\leq 60\%$, dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaian kinerjanya $\geq 80\%$ dengan rincian sebagai berikut :

- Capaian kinerja $\leq 60\%$ dan faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan perangkat daerah.

- 1) Persentase kelitbangan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah dengan target kinerja 70% dari tahun 2014-2018 telah selesai dilaksanakan, namun untuk bukti pemanfaatan belum dapat tercapai sesuai target, karena hasil kelitbangan yang berupa rekomendasi tidak langsung dapat dimanfaatkan menjadi kebijakan pemerintah daerah, karena perlu proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan di bidang kelitbangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: penelitian; pengkajian; pengembangan; perekayasaan; penerapan; pengoperasian; dan evaluasi kebijakan.
- 2) Jumlah rekomendasi ijin penelitian/kuisisioner yang diberikan dengan target rekomendasi ijin penelitian ini memegang peranan penting dalam data dan informasi kelitbangan, namun untuk hal ini belum dapat dilaksanakan dari tahun 2014-2018, karena untuk rekomendasi ijin penelitian di akomodir oleh Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur). Hanya rekomendasi kuisisioner dari Kemenristekdikti yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
- 3) Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kelitbangan Pemerintahan dan Pembangunan Serta Inovasi Daerah pada tahun 2018 hanya tercapai 56%, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan lebih tinggi sedangkan anggaran untuk fasilitasi kegiatan kelitbangan berupa koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah terbatas.
- 4) Jumlah Retribusi Daerah dengan target jumlah pendapatan dari layanan pengujian tahun 2018 hanya tercapai 26% karena diberhentikannya kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi (UPTB-BPMSK)



- 5) Sistem Manajemen Mutu Terpelihara, dokumen yang mendukung tercapainya Sistem Manajemen Mutu tidak dapat dilaksanakan karena dihentikannya kegiatan pengujian laboratorium bidang konstruksi. Dokumen terdiri atas :
 - Audit Internal Laboratorium.
 - Kaji Ulang Manajemen Laboratorium.
 - Kaji Ulang Dokumen Laboratorium.
 - Survailen/Asesmen Laboratorium.
 - Pengendalian Dokumen.
 - Dokumen uji profisiensi laboratorium dan uji banding laboratorium.
 - 6) Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) tahun 2018 tidak dapat mencapai angka indek 80 (A) karena kegiatan kuisisioner kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian laboratorium konstruksi tidak dilaksanakan.
 - 7) Meningkatnya Kualitas Hasil Uji Laboratorium, dengan target layanan uji hanya tercapai 27 layanan uji karena terbitnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi diberhentikan sampai dengan terbitnya kebijakan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi UPTB-BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim.
- b. Capaian kinerja > 60% dan Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan Perangkat Daerah.
- 1) Tersedianya data base kelitbangan dan inovasi daerah berbasis web yang berkualitas, target kinerja tercapai 100%, karena target berupa website telah dilaksanakan berupa kegiatan webhosting.
 - 2) Jumlah penyebarluasan hasil kelitbangan (*press release*, sosialisasi, diseminasi dan peragaan/karya tulis ilmiah dengan target 5 (lima) kegiatan berhasil dilaksanakan setipa tahunnya. Kegiatan terdiri dari :
 - Sosialisasi/FGD Kelitbangan.
 - Jurnal Riset Ilmiah
 - Buletin Lembusuana
 - Laporan Akhir Kelitbangan



- Diseminiasi Kelitbangan (Pusat Peragaan Iptek).
- 3) Jumlah jejaring kerja (*networking*) kelitbangan dan inovasi daerah dengan target 4 (empat) jejaring berhasil dilaksanakan sesuai target tahun pelaksanaan tahun 2014-2018, terdiri dari :
- Kegiatan MoU dan PKS yang telah disepakati.
 - Rakorda Kelitbangan.
 - Rakornas kelitbangan.
 - FKPPD Regional Tengah dan Nasional.

c. Potensi dan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas yang menjadi wajib menjadi pusat perhatian indikator kunci utama kelitbangan adalah Persentase Kelitbangan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah dengan target 70% yang belum dimanfaatkan. Perlu adanya suatu indikator kinerja yang tepat sasaran dan lebih terukur misalnya berupa kegiatan kelitbangan yang bersifat aplikatif dan didukung dengan anggaran yang sesuai kebutuhan.



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	1 (8)	2 (9)	3 (10)	1 (11)	2 (12)
Total Anggaran	23,193,433,462	17,037,000,000	11,673,259,000	18,036,681,000	14,231,786,717	11,191,363,892					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,488,619,752	3,975,750,000	3,683,972,922	3,324,149,115	3,481,097,286	3,489,878,791	95	88	95	65,117,723	55,243,225
Penyediaan jasa surat menyurat	10,500,000	14,500,000	12,000,000	8,621,700	8,692,970	8,944,445	82	60	75	500,000	107,582
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	352,000,000	575,200,000	447,300,000	295,208,526	314,585,979	375,172,898	84	55	84	31,766,667	26,654,791
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	263,800,000	337,200,000	91,487,000	246,699,705	219,446,000	84,437,000	94	65	92	-57,437,667	-54,087,568
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	31,000,000	32,500,000	29,300,000	17,525,200	14,407,100	14,354,100	57	44	49	-566,667	-1,057,033
Penyediaan jasa kebersihan kantor	230,000,000	250,000,000	269,400,000	229,400,000	249,400,000	269,400,000	100	100	100	13,133,333	13,333,333
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50,000,000	60,000,000	70,000,000	49,730,000	48,497,000	68,275,000	99	81	98	6,666,667	6,181,667
Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	100,750,000	76,443,800	59,446,500	87,198,000	61,422,700	99	87	80	5,481,267	658,733
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	46,795,750	50,000,000	41,720,000	37,027,400	31,202,800	33,286,000	79	62	80	-1,691,917	-1,247,133
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19,000,000	22,000,000	18,000,000	18,559,000	20,808,300	16,645,200	98	95	92	-333,333	-637,933



Renstra Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	1 (8)	2 (9)	3 (10)	1 (11)	2 (12)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15,000,000	20,000,000	8,000,000	14,909,950	17,847,966	7,908,200	99	89	99	-2,333,333	-2,333,917
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	64,384,002	53,000,000	31,500,000	48,716,000	40,452,700	30,280,000	76	76	96	-10,961,334	-6,145,333
Penyediaan bahan logistik kantor	35,000,000	50,000,000	30,000,000	34,974,500	47,730,372	29,890,400	100	95	100	-1,666,667	-1,694,700
Penyediaan makanan dan minuman	272,140,000	271,700,000	324,500,000	231,129,500	250,327,490	289,422,950	85	92	89	17,453,333	19,431,150
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,200,000,000	1,228,900,000	1,187,622,122	1,196,008,701	1,222,574,208	1,178,805,399	100	99	99	-4,125,959	-5,734,434
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	650,000,000	700,000,000	769,500,000	647,192,433	697,926,401	744,434,499	100	100	97	39,833,333	32,414,022
Pengamanan aset, kantor dan rumah labatan	189,000,000	210,000,000	277,200,000	189,000,000	210,000,000	277,200,000	100	100	100	29,400,000	29,400,000
Program PenINGKATAN Sarana dan Prasarana Aparatur	4,225,760,000	2,232,150,000	1,527,347,160	3,016,593,308	2,035,756,900	1,467,218,034	71	91	96	-899,470,947	-516,458,425
Pembangunan gedung kantor	2,200,000,000		831,734,000	1,349,129,990		826,810,000	61		99	-456,088,667	-174,106,663
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1,127,260,000	671,600,000	298,387,500	955,495,500	607,104,000	290,287,500	85	90	97	-276,290,833	-221,736,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	33,000,000	418,750,000		31,855,000	413,365,000		97	99		-11,000,000	-10,618,333





Renstra Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan meubelair	195,000,000	50,000,000		194,525,000	49,950,000		100	100		-65,000,000	-64,841,667
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	340,000,000	301,000,000	105,800,000	316,811,400	299,667,600	105,493,900	93	100	100	-78,066,667	-70,439,167
Pemeliharaan rutin/berkala mobil labatan	100,000,000	121,000,000	79,856,850	35,965,971	66,870,582	66,089,988	36	55	83	-6,714,383	10,041,339
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	150,000,000	207,800,000	154,213,810	88,232,447	168,637,640	124,556,646	59	81	81	1,404,603	12,108,066
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40,000,000	45,000,000	24,355,000	17,688,000	17,685,000	24,320,000	44	39	100	-5,215,000	2,210,667
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,500,000	35,000,000	33,000,000	23,065,000	31,664,178	29,660,000	76	90	90	833,333	2,198,333
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000			3,825,000			38			-3,333,333	-1,275,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		307,000,000			305,902,900			100		0	0
Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	75,000,000			74,910,000			100			0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	149,200,000	53,000,000		145,325,000	52,550,000		97	99		-49,733,333	-48,441,667
Pengadaan dinas dan kelengkapannya	16,800,000			16,400,000			98			-5,600,000	-5,466,667
Pengadaan Pakaiannya kerja lapangan	28,600,000	5,000,000		27,425,000	4,750,000		96	95		-9,533,333	-9,141,667
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	103,800,000	48,000,000		101,500,000	47,800,000		98	100		-34,600,000	-33,833,333

77





Renstra Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	1 (1)	2 (2)	3 (3)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	1 (10)	2 (11)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.305.100.000	1.517.350.000	402.255.000	960.921.610	1.051.202.152	357.334.287	74	69	89	-300.948.333	-201.195.774
Pendidikan dan Pelatihan Formal	350.000.000	340.600.000	135.000.000	220.122.560	277.099.198	114.489.887	63	81	85	-71.666.667	-35.210.891
Bimbingan Teknis/Seminar dan Sosialisasi	225.000.000			16.741.350			7			-75.000.000	-5.580.450
Birtek pengelolaan barang, kursus, diklat, Anjab, Raker, Raker dll	-	227.000.000	147.755.000		212.467.073	133.444.400		94	90		44.481.467
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	730.100.000			724.056.800			99			-243.366.667	-241.352.267
Sosialisasi/publikasi/ fasilitas Libang dan IPTEK	-	949.750.000	119.500.000		561.635.881	109.400.000		59	92		36.466.667
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	622.700.000	653.100.000	558.360.900	454.701.375	499.922.650	531.549.200	73	77	95	-21.446.367	25.615.942
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	517.300.000	653.100.000	558.360.900	421.071.375	499.922.650	531.549.200	81	77	95	13.686.967	36.825.942
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	105.400.000			33.630.000			32			-35.133.333	-11.210.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	679.200.000	876.600.000	896.950.000	677.400.000	866.675.000	891.750.000	100	99	99	72.583.333	71.450.000



Renstra Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	1 (1)	2 (2)	3 (3)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	1 (10)	2 (11)
Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	679,200,000	876,600,000	896,950,000	677,400,000	866,675,000	891,750,000	100	99	99	72,583,333	71,450,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	135,800,000	182,400,000	20,000,000	126,595,500	139,300,000	18,545,000	93	76	93	-38,600,000	-36,016,833
Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan	135,800,000	182,400,000	20,000,000	126,595,500	139,300,000	18,545,000	93	76	93	-38,600,000	-36,016,833
Program Penelitian dan Pengembangan	11,771,553,710			8,726,878,426			74			-3,923,851,237	2,908,959,475
Penelitian	2,540,770,660			2,003,908,600			79			-846,923,553	-667,969,533
Pengembangan	6,280,543,232			4,099,609,516			65			-2,093,514,411	1,366,536,505
Pengkajian	2,950,239,818			2,623,360,310			89			-983,413,273	-874,453,437
Program Litbang Bidang SDA & Teknologi	-	1,019,900,000	675,611,100	988,132,800	988,132,800	648,838,502	97	97	96		216,279,501
Litbang Bidang SDA & Teknologi	-	1,019,900,000	675,611,100	988,132,800	988,132,800	648,838,502	97	97	96		216,279,501
Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	1,981,000,000	1,291,348,900	1,784,835,100	1,784,835,100	1,291,128,880	90	90	100		430,376,293
Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	1,981,000,000	1,291,348,900	1,784,835,100	1,784,835,100	1,291,128,880	90	90	100		430,376,293
Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	-	1,886,000,000	801,549,960		885,586,602	784,539,960		47	98		261,513,320
Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	-	1,886,000,000	801,549,960		885,586,602	784,539,960		47	98		261,513,320



Renstra Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	1,522,000,000	1,522,000,000	919,368,900		1,496,272,425	917,771,062	98	98	100	305,923,687	
Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	1,522,000,000	1,522,000,000	919,368,900		1,496,272,425	917,771,062	98	98	100	305,923,687	
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	815,500,000	614,600,000	614,600,000	797,994,158	603,983,000	602,154,100	694,543,476	74	98	87	-5,835,281	30,186,825
Penyusunan roadmap SIDA	200,000,000				182,237,000			91			-66,666,667	-60,745,667
Penyusunan jejaring SIDA	50,000,000	301,910,000	301,910,000	260,235,900	43,500,000	295,425,500	258,197,200	87	98	99	70,078,633	71,565,733
Penyusunan tematik SIDA	415,500,000				278,956,000			67			-138,500,000	-92,985,333
Peningkatan kapasitas SDM SIDA	100,000,000	58,890,000	58,890,000	427,788,345	60,000,000	57,771,400	327,160,450	60	98	76	109,262,782	89,053,483
Penyusunan pusat unggulan IPTEK	50,000,000				39,290,000			79			-16,666,667	-13,096,667
Pengembangan tematik produk strategis	-	153,750,000	153,750,000			151,718,600		99			0	0
Pengembangan pusat unggulan IPTEK	-	100,050,000	100,050,000	109,969,913		97,238,600	109,165,826	97	99		36,395,275	
Program peningkatan jejaring kerja litbang	-	99,000,000	99,000,000			39,263,502		40			0	0
Koordinasi dan kerjasama jejaring kerja litbang	-	99,000,000	99,000,000			39,263,502		40			0	0
Program Peningkatan Pelayanan Penjualan	-	424,150,000	424,150,000	98,500,000		309,038,200	98,266,700	73		100	32,755,567	



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - Rata Pertumbuhan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Laboratorium Bidang Konstruksi												
Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	-	424.150.000	98.500.000		309.038.200	98.266.700		73	100			32.755.567



1. Tahun 2014.

- Terdiri atas 9 (sembilan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan.
- Capaian kinerja keuangan yaitu sebesar Rp. 18.036.547.334,- dari anggaran Rp. 23.193.433.462,- atau sebesar 77,76% dari target capaian kinerja sebesar 100%.
- Hambatan/kendala tidak terealisasi 100% karena efisiensi anggaran, faktor penyebab tidak terserapnya anggaran yaitu kegiatan pembangunan gedung kantor, hal ini terjadi karena masa kontrak yang tidak mencukupi.

2. Tahun 2015.

- Terdiri atas 14 (empat belas) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan.
- Capaian kinerja keuangan yaitu sebesar Rp. 14.231.786.717,- dari anggaran Rp. 17.037.000.000,- atau 83.53% dari target capaian kinerja sebesar 100%.
- Hambatan/kendala tidak terealisasi 100% karena efisiensi anggaran.

3. Tahun 2016.

- Terdiri atas 12 (duat belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan.
- Capaian kinerja keuangan yaitu sebesar Rp. 11,191,363,892,- dari anggaran Rp. 11,673,259,000,- atau 95.87% dari target capaian kinerja sebesar 100%.
- Capaian kinerja keuangan maupun fisik dapat dikategorikan selesai karena realisasi anggaran yang mendekati angka 100%, walaupun ada sisa anggaran dikarenakan efisiensi anggaran.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
Total Belanja	4,000,000,000	3,775,200,000	3,814,749,947	3,416,500,432				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,810,806,000	1,347,840,000	1,716,419,074	1,189,348,444	95	88	-231,483,000	-263,535,315
Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	1,810,806,000	1,347,840,000	1,716,419,074	1,189,348,444	95	88	-231,483,000	-263,535,315
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164,700,000	448,350,000	145,385,495	395,125,395	88	88	141,825,000	124,869,950
Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	164,700,000	448,350,000	145,385,495	395,125,395	88	88	141,825,000	124,869,950
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,055,704,050	770,510,000	1,029,476,442	750,407,938	98	97	-142,597,025	-139,534,252
Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	995,404,050	770,510,000	986,121,942	750,407,938	99	97	-112,447,025	-257,346,967



Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60,300,000			43,354,500		72		-3,050,000	-21,677,250
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	17,404,000	87,500,000	15,829,250	83,654,975	91	96	35,048,000	33,912,862.5
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	13,404,000	51,000,000	11,849,250	50,117,575	88	98	18,798,000	191,341,62.5
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4,000,000	36,500,000	3,980,000	32,537,400	100	89	16,250,000	14,278,700
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	10,500,000	387,750,000	9,750,000	328,682,680	93	85	188,625,000	159,466,340
Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbang	10,500,000	387,750,000	9,750,000	328,682,680	93	85	188,625,000	159,466,340
Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	206,000,000	200,000,000	200,921,600	183,047,190	98	92	-3,000,000	-8,937,205
Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	206,000,000	200,000,000	200,921,600	183,047,190	98	92	-3,000,000	-8,937,205



Uratan ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	173,000,000	263,250,000	171,801,686	261,937,110	99	100	45,12,5000	45,067,712
Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	173,000,000	263,250,000	171,801,686	261,937,110	99	100	45125000	45,067,712
Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	498,485,950	200,000,000	463,330,450	195,271,950	93	98	-149,242,975	-134,029,250
Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	498,485,950	200,000,000	463,330,450	195,271,950	93	98	-149,242,975	-134,029,250
Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	63,400,000	70,000,000	61,835,950	30,024,750	98	43	3,300,000	-15,905,600
Kegiatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	63,400,000	70,000,000	61,835,950	30,024,750	98	43	3,300,000	-15,905,600



1. Tahun 2017.

- Terdiri atas 9 (sembilan) program dan 11 (sebelas) kegiatan.
- Capaian kinerja keuangan yaitu sebesar Rp. 3,814,749,947,- dari anggaran Rp. 4,000,000,000,- atau sebesar 95,36% dari target capaian 100%.
- Capaian kinerja keuangan maupun fisik dapat dikategorikan selesai karena realisasi anggaran yang mendekati angka 100%, walaupun ada sisa anggaran dikarenakan efisiensi anggaran faktor lainnya yaitu pada kegiatan Pra-FS BNI-STP.
- Kegiatan Pra-FS BNI-STP tidak terealisasi 100% karena pengajuan pencairan anggaran melalui Tambahan Uang (TU) tidak mencukupi waktu untuk dilaksanakan.

2. Tahun 2018.

- Terdiri atas 9 (sembilan) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.
- Dari alokasi dana Rp. 3.775.200.000,-, sampai dengan triwulan IV (Januari-Desember) Tahun 2018 telah terealisasi sebesar **Rp. 3.416.500.432,-** atau tercapai 90.50%. Capaian kinerja keuangan triwulan IV telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menungghah kemampuan. Dalam menentukan tantangan, Balitbangda Prov. Kaltim tetap mempedomani Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Renstra Kementerian Negara Riset dan Teknologi serta Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri.

Tantangan yang dihadapi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan aspek organisasi dan tata laksana, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, aspek pembiayaan dan aspek kerjasama, sehingga diperoleh tantangan pengembangan pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim sebagai berikut :

- **Aspek Organisasi dan Tata Laksana**, adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, membawa





konsekuensi perubahan organisasi yang ada di daerah, sehingga perlu penataan ulang maupun penyempurnaan struktur organisasi di daerah. Di samping itu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mengintegrasikan unsur-unsur SIDa melalui satu simpul tujuan bersama yaitu mensejahterakan masyarakat melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- **Aspek Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama bagi fungsional peneliti sebagai ujung tombak organisasi litbang. Namun kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat terbatas, sehingga perlu diatasi, yaitu antara lain dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh fasilitas pendidikan, baik pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknis maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek. Meningkatkan wawasan melalui seminar, diseminasi, workshop, lokakarya baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**, salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas ruang perkantoran berikut fasilitas pendukungnya. Terutama laboratorium data/pusat data litbang yang belum ada, fasilitas perpustakaan yang masih perlu untuk ditingkatkan, peralatan laboratorium pengujian yang tidak layak dan perlu pergantian, hal ini menjadi perhatian guna menjamin kualitas hasil kelitbangan.
- **Aspek Pembiayaan**, dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan aspek anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran yang dikelola masih terbatas dan bersumber pada APBD. Sedangkan dana-dana lainnya dari sumber yang sah dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sementara pembangunan dan pengembangan IPTEK di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit.
- **Aspek Kerjasama**, aspek kerjasama litbang akan dikembangkan bersama dengan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Pihak Swasta, dan untuk



beberapa kementerian teknis terkait di pusat belum dilakukan secara optimal. Hal ini perlu dilakukan karena litbang di Perguruan Tinggi dan Kementrian/Lembaga di pusat memiliki SDM Peneliti yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya. Kemudian kerjasama dengan donor internasional masih belum dilakukan. Litbang masih terfokus pada kegiatan penelitian, pengembangan serta kajian yang dibiayai dari sumber dana APBD.

Peluang adalah suatu cara untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan. Selain itu peluang merupakan ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak bagi suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Ditinjau dari urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, Balitbangda Prov. Kaltim mempunyai peluang pengembangan pelayanan sebagai berikut :

- Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis, maksudnya memantapkan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu, yang artinya kegiatan kelitbangan hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Litbang Provinsi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelitbangan.
- Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat penting diterapkan dalam proses pembangunan dalam bentuk penguatan inovasi daerah.
- Hubungan jejaring antar institusi kelitbangan, perguruan tinggi, maksudnya melalui jejaring tersebut akan mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan IPTEK.
- Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership, maksudnya melalui dana tersebut kegiatan kelitbangan tidak hanya berharap hanya pada dana daerah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ada 5 (lima) permasalahan utama yaitu: 1) rendahnya daya saing SDM Kaltim, 2) pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, 3) belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata, 4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan 5) belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan kelitbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 3.1 dan 3.2 berikut :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan SKPD.	1. Pelaksanaan litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi.	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi SKPD. 2. Standar Pelayanan Publik (SPP)	1. Kualitas dan kuantitas SDM Peneliti masih rendah. 2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). 3. Kedudukan Balitbangda sangat strategis. 4. Komitmen pimpinan sangat kuat.	1. Tersedianya SDM Peneliti di luar Balitbangda. 2. Perkembangan Riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 3. Tersedianya dana dan lembaga litbang partnership. 4. Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah. 5. Persaingan di era globalisasi.	1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di SKPD. 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang. 3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak. 4. Terbatasnya jumlah peneliti yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan daerah.



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				6. Persepsi stakeholder yang kurang responsif terhadap litbang.	5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, teknologi informasi, perpustakaan, dan lain-lain). 6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di kab/kota kecuali kab. Kukar. 7. Belum tersusunnya grand design dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) OPD Balitbangda Prov. Kaltim

Isu Strategis				
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerjasama litbang dengan donatur internasional	1. Sistem Inovasi Nasional (SINAS).	1. Kinerja Inovasi Daerah (KID)	1. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten untuk temuan RISTEK di masyarakat perlu dijamin



Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threats*), atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan **faktor internal** (kekuatan dan kelemahan), serta **faktor eksternal** (peluang dan ancaman) sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S1	Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	W1	Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
S2	Komitmen Pimpinan Kuat	W2	Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
S3	Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	W3	Lemahnya jejaring kerja
S4	Kualitas SDM Peneliti	W4	Belum adanya perda penelitian satu pintu
		W5	Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
		W6	Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
		W7	Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
		W8	Belum adanya rencana induk kelitbangan.
		W9	Belum adanya database peneliti.
		W10	Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.



		W11	Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian
		W12	Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
No	Peluang (Opportunity)	No	Ancaman (Threats)
O1	Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	T1	Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
O2	Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T2	Persaingan di Era Globalisasi
O3	Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	T3	Persepsi stakeholders yang kurang responsif
O4	Adanya peraturan tentang SIDA	T4	Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain
O5	Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	T5	Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah
O6	Adanya asosiasi peneliti di kaltim		

Adapun hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pada Balitbangda Provinsi Kaltim dapat diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.4
Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Internal
(Strength dan Weaknesses)

KEKUATAN (STRENGTH)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Kedudukan Balitbangda Sangat	5	5 / 60 x 100% = 8 %
Komitmen Pimpinan Kuat	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	5	5 / 60 x 100% = 8 %
Kualitas SDM Peneliti	4	4 / 60 x 100% = 7 %
KELEMAHAN (WEAKNESSES)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Kuantitas SDM Peneliti belum optimal	3	3 / 60 x 100% = 5 %
Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Lemahnya jejaring kerja	3	3 / 60 x 100% = 5 %
Belum adanya perda penelitian satu pintu	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.	3	3 / 60 x 100% = 5 %
Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim	3	3 / 60 x 100% = 5 %
Belum adanya rencana induk kelitbangan.	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Belum adanya database peneliti.	3	3 / 60 x 100% = 5 %
Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian	3	3 / 60 x 100% = 5 %
Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.	4	4 / 60 x 100% = 7 %
Jumlah	60	100 %



Sedangkan hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor eksternal (peluang dan ancaman) dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Eksternal
(Opportunity dan Threats)

PELUANG (OPPORTUNITY)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	$5 / 32 \times 100\% = 16 \%$
Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Adanya peraturan tentang SIDa	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	5	$5 / 32 \times 100\% = 16 \%$
Adanya asosiasi peneliti di kaltim	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
ANCAMAN (THREATS)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Persaingan di Era Globalisasi	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Persepsi stakeholders yang kurang responsif	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Jumlah	32	100 %

Tabel di atas menggambarkan bahwa faktor ancaman lebih kecil dibanding bobot pada faktor peluang. Ini berarti Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat mengembangkan peluang yang ada untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi ancaman.

Setelah ditentukan Nilai Urgensi dan ditemukan Bobot Faktor, tahap selanjutnya adalah menentukan Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan





(NBD). Dalam konteks Balitbangda Kalimantan Timur, Nilai Dukungan dan Nilai Bobot Dukungannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Dukungan & Nilai Bobot Dukungan Faktor Lingkungan Internal & Eksternal Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Kekuatan (Strength)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Kedudukan Balitbangda Sangat	5	0,40
Komitmen Pimpinan Kuat	4	0,28
Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	5	0,40
Kualitas SDM Peneliti	4	0,28
		1,36
Kelemahan (Weaknesses)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Kuantitas SDM Peneliti belum optimal	3	0,15
Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang	4	0,28
Lemahnya jejaring kerja	3	0,15
Belum adanya perda penelitian satu pintu	4	0,28
Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.	3	0,15
Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	4	0,28
Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim	3	0,15
Belum adanya rencana induk kelitbangan.	4	0,28
Belum adanya database peneliti.	3	0,15
Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.	4	0,28
Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian	3	0,15
Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.	4	0,28
		2,58



Peluang (Opportunity)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	4	0,5
Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	0,8
Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	3	0,27
Adanya peraturan tentang SIDA	4	0,5
Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	5	0,8
Adanya asosiasi peneliti di kaltim	4	0,5
		3,37
Ancaman (Threats)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	4	0,5
Persaingan di Era Globalisasi	3	0,27
Persepsi stakeholders yang kurang responsif	3	0,27
Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain	4	0,5
Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	3	0,27
		1,81

Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Balitbangda mempergunakan analisis SWOT sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer, yang pada dasarnya dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok strategik, yaitu:

1. **Strategi Strength – Opportunities (SO)**, yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
2. **Strategi Strength – Threats (ST)**, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
3. **Strategi Weakness–Opportunity (WO)**, yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.



4. **Strategi *Weakness – Threats* (WT)**, yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari analisis tersebut di atas maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) SKPD. Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Urutan FKK	Faktor Internal		
	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S3	Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	W2	Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
S1	Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	W4	Belum adanya perda penelitian satu pintu
S2	Komitmen Pimpinan Kuat	W6	Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
S4	Kualitas SDM Peneliti	W8	Belum adanya rencana induk kelitbangan.
		W10	Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
		W12	Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
		W1	Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
		W3	Lemahnya jejaring kerja
		W5	Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
		W7	Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim

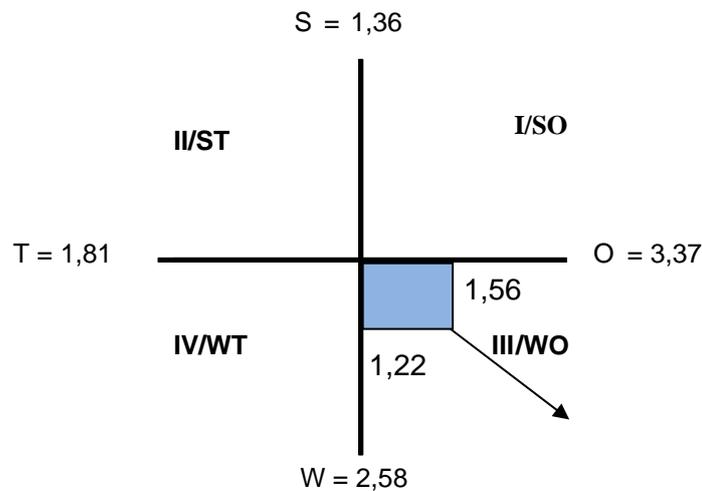


		W9	Belum adanya database peneliti.
		W11	Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian
Urutan FKK	Faktor Eksternal		
	Peluang (Opportunity)	No	Ancaman (Threats)
O5	Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	T1	Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
O2	Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T4	Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain
O1	Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	T2	Persaingan di Era Globalisasi
O4	Adanya peraturan tentang SIDA	T3	Persepsi stakeholders yang kurang responsif
O6	Adanya asosiasi peneliti di kaltim	T5	Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah
O3	Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership		

Sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari analisis SWOT untuk penentuan peta kekuatan organisasi adalah:

- S** : Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat, dan Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis
- W** : Ada 6 weaknes dengan bobot yang sama, diantaranya belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan litbang, kurangnya sarana penelitian dan belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
- O** : Adanya pemindahan IKN ke Kaltim, dan Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- T** : Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah dan adanya rekomendasi penelitian dari OPD lain.

Dapat dipetakan posisi kekuatan organisasi seperti gambar berikut :



Gambar 3.1. Peta Posisi Kekuatan Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim

Diagram peta posisi kekuatan berdasarkan analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa Balitbangda Prov. Kaltim berada pada kuadran III WO yaitu strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD, maka faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan litbang yang mempengaruhi permasalahan litbang adalah:

1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di OPD.
2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang.
3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak.
4. Terbatasnya jumlah peneliti dan bidang kepakarannya yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan provinsi.
5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain-lain).
6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim.





7. Belum tersusunnya *Grand Design* dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Yang menjadi pendorong guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah keberadaan Litbang dan IPTEK yang sangat strategis dan diperlukan dalam percepatan Otonomi Daerah terutama dalam mendorong pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah. Hal ini didukung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 pada pasal 20 (1) dan Pasal 21 (4) : Fungsi Pemda sebagai motivator, stimulator dan fasilitator dalam pembangunan IPTEK maka perlu dibentuk Balitbangda untuk melaksanakan tupoksi tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijadikan sebagai momentum pengembangan litbang secara Nasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011, kegiatan kelitbangan meliputi 2 kegiatan yaitu Kegiatan Utama yang terdiri 1). Penelitian, 2). Pengembangan, 3). Pengkajian, 4). Penerapan, 5). Perekayasaan, 6). Pengoperasian, dan kegiatan pendukung meliputi: 1). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2). Ketatalaksanaan, 3). Sumber Daya Manusia, 4). Sumberdaya organisasi lainnya.

3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu objek yang dapat digunakan dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan lptek yang hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ruang dan wilayah tersebut. Arahan dari penelitian, pengembangan, dan penerapan lptek menjadi penting sebagai acuan dalam menetapkan peruntukkan ruang dan wilayah, sehingga peruntukkan ruang dan wilayah tersebut tidak semata-mata ditetapkan secara subjektif, namun ditetapkan secara objektif berdasarkan potensi dan kehandalan sumber daya yang dimiliki di masing-masing ruang atau wilayah.

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00'Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;





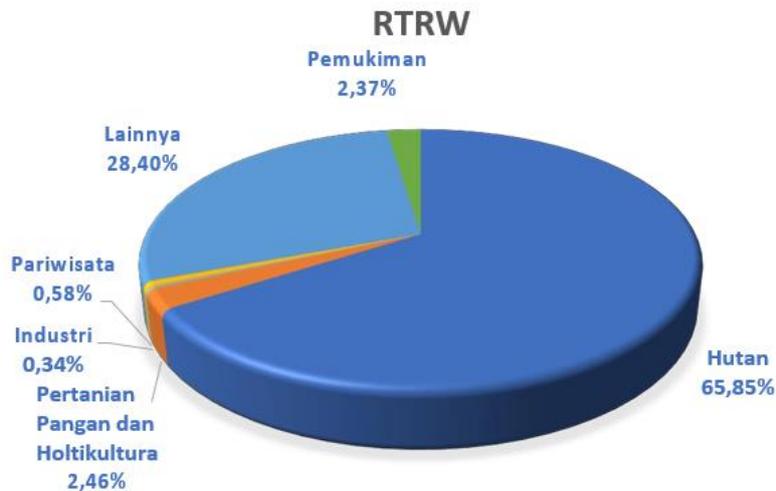
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur berstatus kawasan hutan dengan luasan mencapai 8.339.153 Ha (65,48%), sedangkan sisanya terbagi untuk kawasan industri seluas 57.176 Ha (0,45%), kawasan pariwisata darat seluas 97.442 Ha (0,77%), kawasan perikanan seluas 187.304 Ha (1,47%), kawasan perkebunan seluas 3.269.561 Ha (25,67%) kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), serta kawasan pertanian pangan, dan hortikultura sebesar 412.096 Ha (3,24%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 m sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 m sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 m sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-1500 m) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).





Sumber: Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Provinsi Kaltim 2016-2035

Gambar 3.2. Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.109.696	10	144
2	Kutai Barat	1.370.992	16	194
3	Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4	Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5	Kutai Timur	3.105.171	18	141
6	Berau	2.173.519	13	110
7	Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8	Balikpapan	51.225	6	34
9	Samarinda	71.653	10	59
10	Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur		12.734.692	103	1.038

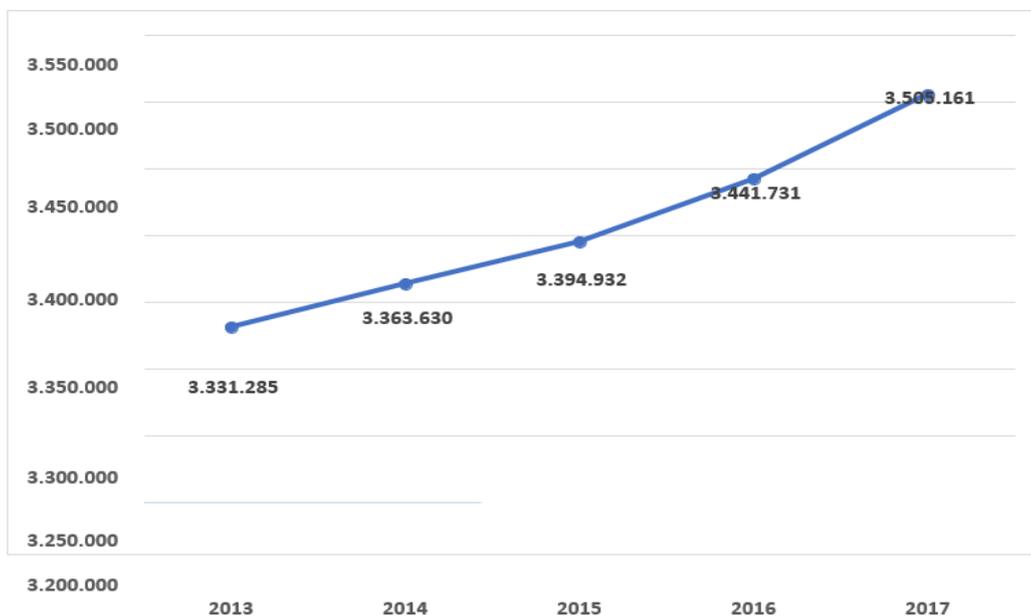
Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim, Jumlah Kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bapeda Prov. Kaltim 2017. Keterangan : *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif



Tabel 3.9
Luas Wilayah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur 2017

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex ratio	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk (2014-2017) (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total			
1	Paser	133.192	122.456	255.648	108,77	23,04	1,59
2	Kutai Barat	84.066	75.934	160.000	110,71	11,67	0,61
3	Kutai Kartanegara	353.323	321.436	674.759	109,92	25,96	0,85
4	Kutai Timur	227.826	190.799	418.625	119,41	13,48	0,36
5	Berau	118.392	103.444	221.836	114,45	10,21	1,68
6	Penajam Paser Utara	87.562	80.450	168.012	108,84	57,46	1,58
7	Balikpapan	323.614	309.582	633.196	104,53	1.236,11	1,44
8	Samarinda	394.435	375.197	769.632	105,13	1.074,11	1,41
9	Bontang	92.066	84.449	176.515	109,02	1.081,98	2,26
10	Mahakam Ulu	14.276	12.662	26.938	112,75	1,39	2,60
Kalimantan Timur		1.828.752	1.676.409	3.505.161	109,09	27,52	1,04

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
Data Sex Ratio, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah data diolah



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3. Jumlah Penduduk Kalimantan Timur 2013-2017



Dengan memperhatikan kajian RT RW, pertumbuhan penduduk dan isu lingkungan hidup yang dihadapi provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan untuk menyediakan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk dasar kebijakan dalam RTRW dan mengangani isu lingkungan hidup.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maka ada beberapa isu sebagai berikut : 1) masih rendahnya daya saing SDM, 2) transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horisontal, 3) pengembangan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah, 4) penurunan kualitas lingkungan hidup, dan 5) pemerintah yang belum mencapai kinerja professional dan akuntabel. Hal ini ditambah lagi dengan masalah eksternal seperti pencapaian SDG's, pencapaian MP3EI, komitmen pemberantasan korupsi, dan koordinasi yang lemah antara provinsi dan kab/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi SDA.

Isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebut perlu mendapat perhatian terkait dengan kegiatan litbang. Juga Kesepakatan Bersama (MoU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Lembaga Litbang Kementerian/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian dan lain- lain telah dibuat yang perlu diperbaharui dan ditindaklanjuti secara kongkrit yaitu:

1. MoU dengan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan dan pengembangan Standardisasi di Kalimantan Timur.
2. MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Prov. Kaltim.



3. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
4. MoU dengan Lembaga Ketahanan Nasional tentang Kerjasama dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. MoU antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Universitas Mulawarman dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kaltim tentang Kerjasama Pembangunan Pusat Teknologi dan Informasi Kelapa Sawit.
6. MoU dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pengembangan Ekonomi dan Wilayah berbasis Sumber Daya Lokal .
7. MoU dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Akademi dan Profesional, Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
8. MoU dengan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian, Universitas Mulawarman tentang Kerjasama Pengembangan dan Penerapan hasil Litbang Teknologi Industri untuk mendukung Pembangunan Industri di Kalimantan Timur.
9. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sedangkan fokus kelitbangan kedepan terkait dengan IPTEK sebagaimana tertuang dalam program Kementerian Riset dan Teknologi yaitu :

- Kelitbangan Teknologi Pangan
- Kelitbangan Teknologi Energi Alternatif dan Terbarukan
- Kelitbangan Manajemen Transportasi
- Kelitbangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kelitbangan Kesehatan dan obat-obatan
- Kelitbangan Pertahanan Keamanan





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Tujuan Perangkat Daerah (PD) harus sejalan dengan tujuan pemerintahan. **Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai** Perangkat Daerah (PD) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan mempedomani sasaran ke 26, misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berbunyi : **“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”**. Sehingga guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Hasil Kelitbangan yang Berkualitas dan Inovatif untuk mendukung Birokrasi yang Efektif dan Efisien “

Tujuan tersebut merupakan turunan dari Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun Penjabaran Tujuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengertian bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa hasil-hasil kelitbangan yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk pembangunan daerah, dan memiliki pengertian bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsuhnya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Berdaulat melalui rekomendasi kebijakan yang inovatif dalam menghadapi permasalahan global, guna mendukung tercapainya tujuan dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Mendukung Birokrasi yang efektif dan efisien yakni bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan yang efektif dan efisien atau tepat guna dan sesuai waktu/target (jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil tercapai).

Tujuan besar ini memiliki pengertian yang mempunyai pandangan jauh ke depan, agar keberadaan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih





inovatif dan antisipatif. Tujuan tersebut juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan kegiatan kelitbangan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu : **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**.

Untuk mewujudkan tujuan Balitbangda maka disusunlah misi dari Balitbangda. Dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023, setelah ditelaah, ternyata semua misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tugas pokok penelitian dan pengembangan, maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki 5 Misi yaitu :

1. Menghasilkan rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui Penguatan Inovasi Daerah.
3. Meningkatkan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Meningkatkan kerjasama kelitbangan dengan akademisi, bisnis, pemerintahan dan komunitas (ABGC).
5. Menyebarkan hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada para pihak.

Maksud dari misi-misi di atas ini adalah bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk bahan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Timur dan *Stakeholder* sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan melalui kegiatan kelitbangan utama (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan), pendukung (peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya), dan penunjang (fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi).



4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien

- Meningkatnya Kualitas Kelitbang Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.
- Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten.
- Terlaksanannya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbang di Provinsi Kalimantan Timur
- Tersedianya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada stakeholders
- Tersebarluaskannya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada stakeholder

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda beserta indikator sasarannya Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan
Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
Misi 1: Menghasilkan rekomendasi hasil kelitbang sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah					
	"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Kelitbang Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah. • Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang • Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah • Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah 	Program Litbang Bidang Sosial pemerintahan	Kegiatan Litbang Bidang Sosial Pemerintahan
				Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi



No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui Penguatan Inovasi Daerah					
	"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah • Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah 	Program Fasilitasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Kegiatan memfasilitasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
				Program Penguatan inovasi daerah HAPUS	Kegiatan Litbang untuk penguatan inovasi daerah HAPUS
Misi 3 : Meningkatkan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur					
	Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerinthan Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Kegiatan Mengikuti Bimtek, Diklat HAPUS
					Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan



No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
			Persentase meningkatnya pelayanan PD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran
			Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pemeliharaan dan peralatan sarana dan prasarana kantor Balitbangda Prov. Kaltim
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	Program penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kerjasama kelitbangan dengan akademisi, bisnis, pemerintahan dan komunitas (ABGC)					
	Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonsasi Kerjasama Antar Lembaga Litbang	Peningkatan kapsitas dan kerjasama antar lembaga kelitbangan	Persentase meningkatnya kapasitas dan kerjasama kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung. Jumlah jejaring kerja (networking) kelitbangan dan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerinthan Daerah Program peningkatan jejaring kerja litbang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Kegiatan MoU dan PKS Kelitbangan





No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
			inovasi daerah		Kegiatan Rakorda Kelitbangan Kegiatan Rakornas Kelitbangan Kegiatan FKPPD Regional Tengah dan Nasional
MISI 5 : Menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada para pihak					
	Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	1. Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> . 2. Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i>.	1. Tersedianya <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah berbasis <i>web</i> yang berkualitas 2. Meningkatnya penyebaran hasil kelitbangan (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Penyebarluasan hasil kelitbangan kepada stake holder	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan Rakorda kelitbangan Diseminasi Kelitbangan Difusi dan Penerapan Teknologi Sosialisasi Pelaksanaan FGD Seminar Hasil Litbang Penerbitan Jurnal Riset Buletin Lembuswana Pameran



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	30%	30%	30%	30%	30%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	30%	30%	30%	30%	30%
			Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah					
	Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung.	78 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	80 (AA)	81 (AA)
			Persentase meningkatnya pelayanan PD	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	80%	90%	100%	100%	100%
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	78 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	80 (AA)	81 (AA)
	Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonisasi Kerjasama antar lembaga litbang	Peningkatan kerjasama antar lembaga kelitbangan	Jumlah jejaring kerja (<i>networking</i>) kelitbangan dan inovasi daerah	4 Jejaring Kerja	5 Jejaring Kerja	6 Jejaring Kerja	7 Jejaring Kerja	8 Jejaring Kerja



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbang dan inovasi daerah	Tersedianya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> .	Persentase tersedianya <i>database</i> kelitbang dan inovasi daerah berbasis <i>web</i> yang berkualitas	3 Media Informasi	3 Media Informasi	3 Media Informasi	3 Media Informasi	3 Media Informasi
		Tersebarluaskannya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i>	Persentase meningkatnya penyebaran hasil kelitbang (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)	80%	80%	80%	80%	80%







BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 5 (Lima) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2019-2023, hal ini diuraikan sebagai berikut:

- 1. Strategi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelitbangan** Balitbangda Prov. Kalimantan Timur berkomitmen dan konsisten dalam melakukan kegiatan kelitbangan yang berkualitas dan didukung oleh SDM serta output yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023, Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA), dan Agenda Riset Daerah (ARD).
- Kebijakan kelitbangan 1 (satu) pintu
- Integrasi SIDA ke RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

- 2. Strategi Kedua : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)**

- Balitbangda Prov. Kalimantan Timur selaku koordinator SIDA di Prov. Kalimantan Timur dapat membangun jejaring kerja dengan unsur-unsur Academy, Business, Government (ABGC) dalam upaya menggali potensi unggulan daerah untuk dapat memiliki daya saing, baik itu keunggulan komparatif dan kompetitif.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya kemampuan IIPTEKIN secara konsisten.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Optimalisasi dan reviu roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai perubahan lingkungan strategis





3. Strategi Ketiga : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN.

4. Strategi Keempat : Mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja dan inovasi daerah.

Optimalisasi pemberdayaan jejaring kerja dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga dan SDM guna menunjang dan mendukung pelaksanaan kelitbangan daerah.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran

- Meningkatnya Kerjasama antar lembaga kelitbangan.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornas.

5. Strategi Kelima : Mengoptimalkan pengelolaan database kelitbangan dan inovasi daerah.

Optimalisasi pengelolaan database kelitbangan dan inovasi daerah dibutuhkan sebagai dokumen internal Balitbangda Provinsi Kaltim dan pemenuhan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Termanfaatkannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah oleh stakeholder.
- Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Penelitiandan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Misi 1 : Menghasilkan rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelitbangan	Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023, kebijakan strategi daerah (JAKSTRADA) dan agenda riset daerah (ARD).
			Integrasi SIDA dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
			Kebijakan kelitbangan satu pintu
Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui Penguatan Inovasi Daerah.			
"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan system inovasi daerah (SIDa)	Optimalisasi dan <i>review roadmap</i> Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai perubahan lingkungan strategis.





Misi 3 : Meningkatkan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur

Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inovasi daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitaas kelitbangan di provinsi kaltim	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan	Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN
--	--	---	--

Misi 4 : Meningkatkan kerjasama kelitbangan dengan akademisi, bisnis, pemerintahan dan komunitas (ABGC).

Terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi Kerjasama antar Lembaga litbang	Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga kelitbangan	Mengoptimalkan pembedayaan jejaring kerja dan inovasi daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornis.
--	--	--	---

Misi 5 : Menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada para pihak.

Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Tersedianya database hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan database kelitbangan dan inovasi daerah	Dibentuknya aplikasi media informasi kelitabngan berbasis web
	Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder		







BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Balitbangda Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balitbangda. Kedua, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Balitbangda sehari-hari pada seluruh bidang.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra OPD dibutuhkan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 berikut ini.



Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah. Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten 	
S1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kelitbangan			
S2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem inovasi daerah (SIDa)			
	K: Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023, Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA), dan	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan
	K : Intergrasi SIDA dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.		
	K: Kebijakan Kelitbangan satu pintu.		
	K : Optimalisasi dan reviu roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai perubahan lingkungan strategis	Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial dan Budaya Yang Dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan
		Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan



		Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan
			Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan
		Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi
		Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan
			Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan
			Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi



Dalam rangka mendukung pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra PD program dan kegiatan manajerial dan perkantoran terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang dibutuhkan program dan kegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 6.2

Rencana Program dan Kegiatan Manajerial dan Perkantoran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
	Sasaran :	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur - Meningkatnya kerjasama antar lembaga kelitbangan - Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder - Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder 	
S3 : Mengoptimalkan pengelolaan <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah S4 : mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja dan inovasi daerah S5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.			
	K : Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal
		Kegiatan pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan
		Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana
	K : Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)
		kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran



No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapanm Sarana Dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi
		Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja PD
		Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
		Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
	K : Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornas	Program Peningkatan Kerjasama Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase terlaksananya Kerjasama Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah
		Kegiatan Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah	Jumlah Kegiatan Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah



B. Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun pendanaan indikatif Tahun 2019-2023 tercantum pada tabel 6.3 sebagaimana berikut :





Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Dalam juta Rupiah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	0%	70%	336.500.000	80%	370.000.000	90%	410.000.000	95%	420.000.000	100%	430.000.000	100%	1.996.500.000	Bid. Sospe m	Dalam dan Luar Prov. Kaltim
			Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	65.025.000	1 laporan	61.336.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	5 laporan	1.200.000.000		
	2. Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi	2. Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah																	





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	(IPTEKIN) secara Konsisten	3. Persentase Kebijakan 3. Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	35.760.000	1 laporan	39.930.500	1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
				Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	99.215.000	1 laporan	148.733.500	1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
			4. Kegiatan penelitian mandiri bidang social dan pemerintahan	0 laporan	7 laporan	136.500.000	7 laporan	120.000.000	7 laporan	160.000.000	7 laporan	170.000.000	7 laporan	180.000.000	35 laporan	766.500.000			





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntna PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Program Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	0%	70%	356.750.000	80%	370.000.000	90%	550.000.000	95%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	2.406.750.000	Bid. Ekbang	Dalam dan Luar Prov.Kaltim
			Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	65.000.000	1 laporan	83.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	5 laporan	1.263.250.000		
		Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		0 laporan	1 laporan	133.250.000	1 laporan	83.500.000	1 laporan	1 laporan		1 laporan	5 laporan						
		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan		0 laporan	1 laporan	65.000.000	1 laporan	83.500.000	1 laporan	1 laporan		1 laporan	5 laporan						





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan															
			Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0 laporan	5 laporan	93.500.000	6 laporan	120.000.000	6 laporan	300.000.000	6 laporan	250.000.000	6 laporan	300.000.000	30 laporan	1.143.500.000		
			Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	270.000.000	80%	330.000.000	90%	450.000.000	95%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	2.450.000.000	Bid. Intek	Dalam dan Luar Prov.Kaltim
			Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi	0 laporan	1 laporan	67.000.000	1 laporan	125.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	350.000.000	5 laporan	1.350.000.000		





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				yang dilaksanakan															
				Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	66.500.000	1 laporan	125,000.000	1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
				Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	66.500.000			1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
				Kegiatan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	0 laporan	4 laporan	70.000.000	1 laporan	80.000.000	4 laporan	200.000.000	4 laporan	350.000.000	4 laporan	400.000.000	17 laporan	1.100.000.000		





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Memfasilitasi kegiatan kelibangan pemerintahan dan pembangunan serta inovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelibangan di Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja PD		78 (BB)	174.620.000	79 (BB)	99.620.000	79 (BB)	211.000.000	80 (A)	213.100.000	81 (A)	272.745.000	81 (A)	971.085.000	Sekretariat	Prov. Kaltim
			Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	0 dokumen	10 dokumen	103.120.000	10 dokumen	28.120.000	10 dokumen	79.000.000	10 dokumen	67.900.000	10 dokumen	99.825.000	50 dokumen	377.965.000		
			Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	0 laporan	23 laporan	71.500.000	23 laporan	71.500.000	23 laporan	132.000.000	23 laporan	145.200.000	23 laporan	172.920.000	115 laporan	593.120.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase meningkatnya pelayanan PD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1.299.575.000	85%	1.376.795.000	90%	1.042.500.000	95%	1.026.750.000	100%	1.029.425.000	100%	4.475.470.000	Sekretariat	Samarinda
			kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	0 kegiatan	15 Kegiatan	1.299.575.000	15 Kegiatan	1.376.795.000	15 Kegiatan	1.042.500.000	15 Kegiatan	1.026.750.000	15 Kegiatan	1.029.425.000	15 Kegiatan	4.475.470.000		
		Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 Unit	446.450.000	3 Unit	526.650.000	4 Unit	891.500.000	5 Unit	930.650.000	5 Unit	935.780.000	5 Unit	3.731.030.000	Sekretariat	Samarinda
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	0 kegiatan	8 Kegiatan	446.450.000	8 Kegiatan	526.650.000	8 Kegiatan	891.500.000	8 Kegiatan	930.650.000	8 Kegiatan	935.780.000	8 Kegiatan	3.731.030.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas penduku ng.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki ASN standar kompetensi	0 %	80%	789.785.000	81 %	956.815.000	82%	515.000.000	83%	596.500.000	85%	632.750.000	85%	3.490.850.000	Sekretariat	Prov. Kaltim
			Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	0 orang	77 Orang	200.000.000	130 Orang	904.265.000	155 Orang	340.000.000	180 orang	394.000.000	205 Orang	400.000.000	747 orang	2.238.265.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatannya Kualitas Sumber Daya Aparatur	0 Orang	10 Orang	87.450.000	11 Orang	52.550.000	12 Orang	175.000.000	13 Orang	202.500.000	13 Orang	232.750.000	60 Orang	750.250.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Menyediakan dan menyebarkan hasil kelitbang dan inovasi daerah	Tersedianya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada stakeholder	Tersedianya database kelitbang dan inovasi daerah berbasis web yang berkualitas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	0%	80%	129.420.000	80%	270.120.000	80%	330.000.000	80%	363.000.000	80%	399.300.000	80%	1.491.840.000	Sekretariat	Samarinda
	Tersebarluaskannya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada stakeholder	Meningkatnya penyebaran hasil kelitbang (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)																	
			Kegiatan pengembangan teknologi informasi kelitbang	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbang	0%	80%	6.000.000	80%	107.550.000	80%	165.000.000	80%	181.500.000	80%	199.650.000	80%	738.700.000		





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan bulletin lembusuan	0 artikel	70 artikel 36.550.000	70 artikel		350 artikel											
			Kegiatan Rakorda Kelitbang	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbang	0%	100% 86.870.000	100%	162.570.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	795.590.000				





BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023 adalah seperti disajikan berikut ini:

- 1.1. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing (dengan 5 sasaran)
- 2.1. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (dengan 3 sasaran)
- 2.2. Mewujudkan struktur ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan (dengan 3 sasaran)
- 3.1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar (5 sasaran)
- 3.2. Mendorong percepatan pengembangan kawasan strategis provinsi (dengan 1 sasaran)
- 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (1 sasaran)
- 4.2. Mewujudkan pengelolaan SDA yang berpihak pada daerah dan berkelanjutan (dengan 2 sasaran)
- 5.1. Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik (dengan 7 sasaran)
- 5.2. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (1 sasaran).

Indikator kinerja Balitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Balitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. berikut ini.



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangdan	0%	30%	30%	30%	30%	30%	60%
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	0 %	30%	30%	30%	30%	30%	60%
3	Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Di Daerah	0%	30%	30%	30%	30%	30%	60%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini merupakan penajaman target yang akan dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023. Renstra ini harus dijadikan sebagai arahan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan manajerial dan Kelompok Penelitian lingkup Balitbangda untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Balitbangda dengan memenuhi aspek berani dan berdaulat.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan komitmen, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara para pihak agar seluruh sumber daya yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Balitbangda yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insan Balitbangda untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Balitbangda, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
2. Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh pegawai dan para pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dokumen ini merupakan Renstra yang akan difinalisasi berdasarkan masukan para pihak dan penyesuaian dengan RPJMD yang sudah disahkan.

